

ILLEGAL LOGGING DI KALIMANTAN SELATAN **(Studi di Taman Hutan Raya Sultan Adam** **Kalimantan Selatan)**

Illegal Logging in South Kalimantan *(Study in The Grand Forest Park of Sultan Adam of* *South Kalimantan)*

Alip Winarto¹, Haryanto², dan Wawan Mas'udi²

Program Studi Ilmu Politik
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This study of concerning phenomenon of illegal logging is conducted at society community doing activity of illegal logging in the Grand Forest Park of Sultan Adam, a conservation area in South Kalimantan which at one blow function as catchment area of the Dam of Riam Kanan. This dam is sharing very vital for society of South Kalimantan that is beside as electric power supply, also as source of raw material drinking water, irrigation of agriculture and fishery, flood control, and others which its taking place is influenced by looking after of the Grand Forest Park of Sultan Adam as its catchment area. This study is to know the cause factors and process the happening of illegal logging in local level so that can determine the related solution alternative with the the problems.

The primary data in this study were collected by using principle of theoretical sampling and principal of snow ball of passing process interview that assumed know the phenomenon of illegal logging. They are farmer, worker in wood sector, consisted of the operator of chainsaw and truck chauffeur, sawmill owner, NGO, as well as related government agency with the forestry business. Beside that is also supported by data skunder publicized by a related governmental institution. Method used in this study is descriptive qualitative intended to study the data or fact is later on interpreted in such a manner so that result of analysis can give the illustration of concerning process and cause factors of the happening of illegal logging in the Grand Forest Park of Sultan Adam.

Result of this study indicates that the process of the happening of illegal logging in the Grand Forest Park of Sultan Adam entangle governmental agency, capital owner (boss) and from society circle conducted by various modus operandi to interrogate from punish lassoing and strive smoothly its activity. This modus operandi is conducted by partys in concerned in acti-

¹ Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru

² Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

vity of illegal logging of either through direct and also indirectly as according to ability and authority of each consisted of the related *modus operandi* with the legality of wood, transportation of wood, community of effort, reason and wood usage. While factors causing the happening of illegal logging is related and explainable with a few aspect, that is legality aspect, social economics of society, difference of wood supply and demand and also rule of law enforcement.

Key word : *illegal logging, the Grand Forest Park of Sultan Adam*

PENGANTAR

Latar Belakang

Illegal logging merupakan salah satu pemicu *deforestasi* yang melanda sebagian baik di kawasan hutan produksi maupun konservasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam mengurangi aktivitas *illegal logging* termasuk di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam Kalimantan Selatan yang merupakan *catchment area* Waduk Riam Kanan. Waduk Riam Kanan mempunyai peran cukup vital bagi kesejahteraan masyarakat, yaitu penyedia bahan baku air minum, pengendali banjir, irigasi teknis untuk pertanian, perikanan, perkebunan, wisata serta transportasi. Keberlangsungan waduk ini sangat tergantung pada terpeliharanya *catchment area* yang ada di atasnya.

Menurut PLN Wilayah VI dalam (Anonim, 2002: 1-2) debit *inflow* Waduk Riam Kanan sangat bervariasi dan cenderung menurun. Sedimentasi telah melebihi batas kritis sedimen yang diperkenankan menurut perencanaan waduk. Kondisi ini diduga sebagai akibat kerusakan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam yang berfungsi sebagai *catchment area*, salah satunya sebagai akibat *illegal logging*. Hal inilah yang menjadi latar belakang studi tentang fenomena *illegal logging* pada kawasan ini, terkait dengan proses dan faktor penyebab terjadinya, sehingga dapat memberikan alternatif solusi atas permasalahan ini.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Mengapa terjadi *illegal logging* di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan faktor-

faktor penyebab terjadinya *illegal logging* di tingkat lokal. Dengan mengetahui proses faktor-faktor penyebab ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan alternatif solusi yang tepat terkait dengan fenomena *illegal logging* di tingkat lokal.

Kerangka Pikir

a. *Interaksi Masyarakat dan Hutan*

Hutan merupakan lapangan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati. Bagi manusia hutan dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Menurut Sardjono (2004: 32-33) amat mudah dipahami bila sebagian besar masyarakat lokal pedesaan dan pedalaman di luar Jawa menggantungkan kehidupannya kepada sumber daya hutan, mengingat 60% luas wilayah daratannya berupa hutan. Ketergantungan tersebut tidak sebatas pada aspek produksi hutan dan lahan hutan, tetapi juga fungsi perlindungan dan fungsi tata iklim yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal secara langsung maupun tidak langsung dalam mempertahankan hidup dan peningkatan kesejahteraan mereka.

Menurut Sardjono (2004: 35-37), ketergantungan masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan dapat dikategorikan dalam 4 pola. *Pertama*, Pola ekstraksi yaitu pola pemanfaatan terbatas pada kebutuhan yang dikendalikan oleh etika dan norma yang berlaku. *Kedua*, pola eksploitasi yaitu merupakan pola dimana sistem sosial terpisah dari sistem hutan untuk meningkatkan aliran manfaat. *Ketiga*, pola konfrontasi yaitu pola di mana terdapat konflik kepentingan yang tinggi yang terlihat dari tidak adanya keselarasan kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian sumber daya hutan. *Keempat*, pola kooperasi, merupakan alternatif pendayagunaan saling ketergantungan masyarakat lokal dengan sumber daya hutan dimana terdapat kepentingan paralel antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Sementara itu Mubyarto *et al.* (1992: 4-6) mengemukakan bahwa petani di sekitar hutan melihat hutan sebagai cadangan bagi perluasan lahan usaha tani dan sebagai sumber ketahanan pangan (*food security*) baik secara langsung berupa bahan pangan maupun berbentuk masyarakat non pangan yang dapat mereka peroleh.

Interaksi ekologis masyarakat dengan hutan terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya hutan sebagai sumber kayu bakar, sumber mata air, protein hewani, nabati dan berbagai fungsi ekonomi dan manfaat langsung lainnya yang didapatkan masyarakat dari hutan. Hubungan keduanya bersifat ketergantungan, saling mempengaruhi dan

mampu merubah lingkungan biofisik tersebut. Tingkat kepekaan masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

b. Kebijakan Desentralisasi di Sektor Kehutanan

Berubahnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi diharapkan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil, termasuk di dalamnya dalam memperbaiki kondisi sumber daya hutan. Menurut Rondineli dan Cheema dalam Purwoko dan Dirdjosanjoto (2004: 53) desentralisasi merupakan pemindahan kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan atau administrasi dari pemerintah pusat ke organisasi lapangan, unit administrasi lokal, organisasi-organisasi semi otonom dan dibentuk negara (*parastatal*), pemerintah daerah atau LSM. Tujuan desentralisasi adalah mewujudkan terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Rondineli dan Cheema dalam Colfer dan Resosudarmo (2004: 400) mengklasifikasikan berdasarkan tujuan politik, spasial, pasar dan ruang.

Desentralisasi mulai berkembang pada saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah pusat harus memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah terutama dalam kegiatan operasional. Pemerintah pusat hanya memiliki beberapa fungsi saja, sebagian besar fungsi lainnya dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota.

Menurut Krustanto (2001: 186) proses desentralisasi sektor kehutanan banyak terjadi kontroversi. Departemen Kehutanan misalnya, hanya mengedapankan paradigma dan aturan lama yang dimodifikasi seolah-olah menjadi aturan baru, sehingga upaya-upaya mempertahankan hegemoni penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan masih menjadi tujuan utama. Desentralisasi secara substansi belum mengakomodir kepentingan masyarakat daerah. Beberapa kebijakan masih belum disesuaikan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, berakibat pada persoalan konflik sumber daya hutan, *illegal logging* dan persoalan-persoalan lainnya tidak kunjung selesai.

Dermawan dan Resosudarmo dalam Colfer dan Resosudarmo (2004: 414-425) menyatakan bahwa terdapat beberapa isu penting yang telah diidentifikasi pada masa transisi menuju desentralisasi formal. Isu-isu tersebut antara lain adalah sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan yang penting bagi daerah, perencanaan tata ruang dan tata

guna lahan merupakan praktek di atas kertas, konsesi hutan skala besar (HPH) ditentang oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal serta ancaman serius kawasan konservasi dan kawasan lindung dari kerusakan.

Dermawan dan Resosudarmo dalam Colfer dan Resosudarmo (2004: 425-426) juga menyatakan bahwa walaupun diperkirakan bahwa perubahan menuju otonomi daerah saat ini lebih nyata dibandingkan dengan upaya-upaya sebelumnya tampak masih ada kecenderungan tarik ulur antara berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini terutama terjadi pada level pemerintah pusat dan dalam kadar tertentu di level pemerintah provinsi, yang memberikan kesan bahwa mereka berupaya mempertahankan atau berusaha mengambil kembali tanggung jawab secara umum.

c. Eksistensi Illegal logging

Terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari Bahasa Inggris. Dalam *Contemporary English Indonesian Dictionary* (Salim, 1987: 925), *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary* (Garner, 1999: 750) *illegal* artinya *forbidden by law, unlawful* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan dan *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian (Salim, 1987: 1094).

FWI dan GFW (2001: 36) menggambarkan *illegal logging* merupakan semua praktek kehutanan yang berkaitan dengan, pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia, yang selanjutnya dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan dalam perijinan yang dimilikinya atau melibatkan pencuri kayu orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Sedangkan menurut Sumitro (2000: 22) dari sisi administratif yang dimaksud dengan *illegal logging* adalah pemungutan kayu di luar yang direncanakan oleh Departemen Kehutanan melalui RKT.

Menurut Haba yang dikutip Nurdjana et. al., (2005: 14-15), luasnya jaringan kejahatan *illegal logging* yang mencerminkan luasnya pengertian *illegal logging* itu sendiri, menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait mulai dari sumber atau produsen kayu *illegal* atau melakukan penebangan kayu secara *illegal* hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Proses *illegal logging* dalam perkembangannya semakin nyata dan seringkali kayu *illegal* dari hasil *illegal logging* dicuci lebih dahulu sebelum memasuki

pasaran kayu legal dengan kata lain kayu-kayu yang pada hakekatnya *illegal* dilegalkan oleh pihak tertentu dengan bekerjasama dengan aparat sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasaran sulit diidentifikasi mana yang merupakan kayu legal dan kayu *illegal*

Pelaku *illegal logging* menurut Arupa (2002: 9), terdiri dari masyarakat penebang liar sekitar hutan maupun pendatang dari luar, yang dimodali oleh para cukong kayu serta dibekingi oleh aparat keamanan dan instansi terkait, kemudian para pemegang HPH baik BUMN maupun HPH swasta. Sedangkan menurut Mabes Polri dalam Nurdjana, et. al. (2004: 102) terdiri dari masyarakat setempat maupun pendatang, pemilik modal (cukong) dan pengusaha, pemilik industri kayu atau pemilik HPH, nahkoda kapal, oknum pejabat pemerintah atau oknum pemerintah dan pengusaha asing. Dalam menjalankan aksinya para pelaku *illegal logging* ini menggunakan berbagai modus operandi.

Modus operandi dalam kegiatan *illegal logging* menurut Mabes Polri dalam Nurdjana et. al (2004: 103-104) dibedakan menjadi dua hal yaitu modus di daerah hulu dan modus di daerah hilir. Modus operandi di daerah hulu terdiri dari: penebangan tanpa ijin oleh masyarakat dan hasil tebangannya dijual kepada cukong kayu atau pengusaha, penebangan di luar ijin oleh HPH. Modus operandi di daerah hilir terdiri dari pengangkutan kayu tanpa atau dengan dokumen SKSHH palsu atau dipalsukan, SKSHH dari daerah lain atau penggunaan dokumen SKSHH berulang-ulang, fisik kayu tidak sesuai dengan dokumen SKSHH, serta penggunaan dokumen lain sebagai pengganti SKSHH.

Sutarto (2004: 7) menyebutkan bahwa TNI telah mengidentifikasi modus operandi *illegal logging* menjadi tiga hal. *Pertama*, modus operandi di hulu, yaitu penebangan liar yang dilakukan masyarakat atau para penebang HPH. *Kedua*, modus operandi di industri pengolahan, yaitu industri menerima kayu hasil *illegal logging* yang kemudian diolah dan dilaporkan menjadi kayu legal. *Ketiga*, modus operandi di lintasan angkutan, yaitu dengan cara meloloskan kayu *illegal* untuk dipasarkan dengan menggunakan dokumen palsu.

Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (2004) ada beberapa modus *illegal logging* dan peredarannya yang terjadi saat ini. *Pertama*, pengangkutan kayu tidak sesuai dengan SKSHH (jenis, volume dan jumlah batang, dan asal kayu). *Kedua*, penertiban SKSHH tidak sesuai ketentuan (tidak dilakukan pemeriksaan fisik). *Ketiga*, penerbitan ijin pemanfaatan tidak sesuai dengan potensi hutan yang ada terjadi pemutihan kayu *illegal* dari luar kawasan yang dibebani ijin pemanfaatan. *Keempat*, legalisasi kayu hasil tebang liar dengan menerbitkan

dokumen SKSHH.

Menurut Ismail (2000: ix) *illegal logging* harus dilihat dari perspektif yang komprehensif dengan segala aspeknya. *Pertama*, aspek legal yang terkait dengan regulasi yang dalam operasionalnya hanya menguntungkan konglomerat. *Kedua*, aspek ketidakseimbangan antara kemampuan produksi kayu (*supply*) dengan kapasitas industri perikanan dan pemanfaatan domestik (*demand*). *Ketiga*, aspek sosial ekonomi yang berhubungan dengan masalah keterbatasan lapangan kerja, tingkat sosial ekonomi, akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dan lain-lain. *Keempat*, aspek politik terutama setelah digulirkannya reformasi dan otonomi daerah telah menimbulkan euforia yang berdampak negatif yaitu perilaku masyarakat dan pemerintah daerah yang kebablasan. *Kelima*, aspek penegakan supremasi hukum yang berhubungan dengan tidak adanya kesungguhan dalam penegakan supremasi hukum karena keterlibatan aparat dalam aktivitas *illegal logging*.

Menurut Wijanto (2004: 8) *illegal logging* lebih disebabkan oleh faktor krisis ekonomi yang berdampak pada semakin meningkatnya kemiskinan masyarakat dan semakin terpuruknya dunia usaha kehutanan, diperparah dengan rendahnya komitmen dan upaya penegakan supremasi hukum. *Illegal logging* kemudian dianggap merupakan jalan pintas yang paling baik untuk mempertahankan dari tekanan krisis ekonomi baik oleh masyarakat maupun oleh suatu badan usaha kehutanan. Sedangkan menurut Awang (2003: 186) kerusakan hutan sebagai akibat penebangan liar disebabkan oleh ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* kayu bulat yang berdampak pada defisit kayu bulat sebagai bahan baku industri, faktor pemerintah yang tidak dapat mengendalikan ijin-ijin baru industri kehutanan, faktor pola Departemen Kehutanan dan fokus bisnis kehutanan yang hanya mengutamakan hasil hutan kayu, faktor pemodal yang cenderung menyukai jalan pintas, faktor kemiskinan yang menyelimuti masyarakat sekitar hutan serta pola-pola pengusaha hutan yang ditiru oleh masyarakat sekitar hutan.

Dudley dalam Colfer dan Resosudarmo (2003: 448-450) mengelompokkan faktor penyebab terjadinya *illegal logging* menjadi tiga faktor yang menyebabkan maraknya kegiatan tersebut pada tingkat lokal dan memungkinkannya meluas dengan cepat. *Pertama*, faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa dekat hutan. *Kedua*, faktor ekonomi suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu. *Ketiga*, faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruh serta kolusi mereka dengan politisi dan pemimpin setempat.

CARA PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mengkaji data dan fakta yang selanjutnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran tentang fenomena sosial secara lengkap. Penelitian ini akan menggambarkan, mengeksplorasi faktor-faktor yang penyebab terjadinya *illegal logging* di areal Taman Hutan Raya Sultan Adam, sehingga metode penggalian data yang dipilih dalam hal ini adalah melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Prosedur atau langkah-langkah ditempuh untuk sampai pada kesimpulan hasil adalah pengumpulan data, penilaian atau analisa data, penafsiran data serta pengambilan kesimpulan.

Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi menghimpun data dari instansi terkait di daerah dan informan kunci terutama khususnya elemen masyarakat yang terkait aktivitas *illegal logging* dan melakukan pengamatan secara acak terhadap aktivitas *illegal logging*. Penelusuran sumber data di lapangan menggunakan prinsip teknik *theoretical sampling* dan prinsip *snowball*. Prinsip *theoretical sampling* dipakai pada saat awal turun ke lapangan dengan mendasarkan pada kriteria yang ditemukan di lapangan berdasarkan konsep yang didapat dari informasi awal. Prinsip *snowball* dipakai untuk melakukan identifikasi permasalahan yang tengah dikaji dari informan kunci untuk menelusuri orang-orang yang kemudian jadi responden yang memiliki informasi mengenai masalah atau hal yang dikaji.

Dalam penelitian ini dibutuhkan data primer dan skunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam aktivitas *illegal logging* dan pihak yang memiliki kekayaan pengetahuan tentang *illegal logging*. Mereka adalah masyarakat petani atau peladang di sekitar hutan, para pekerja perkayuan (operator *chainsaw*, sopir truk), tokoh masyarakat, aparat pemerintah, LSM dan organisasi atau wadah pengusaha yang bergerak pada sektor perkayuan di Kalimantan Selatan. Data sekunder berbentuk dokumen resmi instansi pemerintah terkait yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah terkait di Kalimantan Selatan antara lain adalah Dinas Kehutanan (Provinsi/Kabupaten), Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Badan Pusat Statistik.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah komunitas masyarakat yang melakukan aktivitas *illegal logging* di kawasan Taman Hutan Raya Sul-

tan Adam yang terkonsentrasi pada beberapa desa definitif¹ yaitu Desa Aranio, Desa Tiwingan Lama, Desa Tiwingan Baru dan Desa Belangian. Secara administratif pemerintahan desa-desa ini masuk wilayah Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku dan Modus Operandi

Pelaku yang terlibat dalam aktivitas *illegal logging* yaitu aparat pemerintah, cukong (pemilik modal) dan masyarakat. Aparat pemerintah yang terlibat mulai level staf sampai pejabat eselon baik yang bertindak secara personal maupun kelembagaan yang antara lain diinisiasi oleh kewenangan yang dimiliki pasca pemberlakuan otonomi daerah. Pasca otonomi daerah PAD menjadi salah satu obsesi aparat pemerintah secara kelembagaan, disamping obsesi secara personal terkait dengan fee yang diterima oleh aparat tertentu dari pemilik modal. Mereka berperan lewat penerbitan dokumen pengangkutan kayu yang dipalsukan misalnya SKSHH terbang² dan ijin pemanfaatan kayu fiktif untuk melegalisasi kayu-kayu ilegal, pungutan liar, sebagai *backing* yang berada di balik aktivitas *illegal logging* atau sekaligus menjadi penadah kayu *illegal* dengan mendirikan atau memiliki *sawmill* sendiri.

Cukong memainkan peran dengan cara mengeluarkan beaya atau imbalan kepada aparat, memberikan modal kepada penebang liar, sebagai penadah, dan kadang-kadang sekaligus juga sebagai pemilik *sawmill*. Cukong dapat menciptakan suatu kondisi sehingga hanya pelaku di lapangan yang bisa dijerat hukum, seolah-olah tidak ada kaitan antara cukong dengan pelaku di lapangan. Untuk memuluskan keinginannya cukong juga sering menggerakkan masa.

Masyarakat berperan sebagai pelaku langsung di lapangan antara lain sebagai penebang kayu di hutan, tukang tarik, sopir truk atau klotok yang biasa mengangkut kayu dari hutan sampai ke lokasi penadah kayu (*sawmill*). Menurut mereka imbalan yang diperoleh dari *illegal logging* lebih menjanjikan dan dalam waktu relatif lebih cepat daripada berladang. Hal ini menjadi salah satu motivasi bagi mereka untuk lebih intensif terlibat dalam *illegal logging*.

Para pelaku *illegal logging* menggunakan beberapa modus operandi dengan tujuan untuk mengelabui aparat penegak hukum agar lolos dari jeratan hukum, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Modus operandi mengalami pergeseran dari waktu ke waktu seiring dengan semakin jelinya aparat penegak hukum melihat fenomena *illegal logging*. Modus operandi teridentifikasi di lapangan antara lain adalah modus

operandi pengangkutan kayu dari kawasan hutan menuju ke tempat penampungan (*sawmill*), modus operandi legalitas kayu, modus alasan pemanfaatan kayu, serta modus operandi komunitas usaha.

Modus operandi legalitas kayu dijalankan melalui penerbitan ijin pemanfaatan kayu fiktif seperti IPKTM, IPKR, IPKL dan ijin sejenis lainnya yang diterbitkan sejalan dengan kewenangan baru pemerintah daerah pasca berlakunya otonomi daerah. Ijin-ijin tersebut digunakan untuk melegalisasi kayu-kayu yang sebenarnya berasal dari hasil *illegal logging* baik dari kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam maupun dari kawasan lain di sekitarnya bahkan dari luar wilayah kabupaten dan Provinsi. Dalam bahasa lokal ijin-ijin ini dikenal dengan istilah "pemanfaatan ijin kayu".

Dalam pengangkutan kayu terdapat beberapa macam modus yang biasanya dilakukan. Diantaranya adalah menggunakan truk tetapi di atasnya diberi muatan sayur atau pisang sehingga tidak tampak mengangkut kayu, menggunakan *dump truck* yang biasanya digunakan untuk mengangkut batu bara atau tanah. Dalam skala kecil sering juga menggunakan truk tangki, atau *pickup* sehingga memberikan kesan kayu tersebut bukan untuk keperluan komersial. Semakin jeli dan semakin tingginya intensitas razia kayu *illegal* seiring juga dengan modus operandi untuk mengelabui aparat yang semakin berkembang. Mobil mewah seperti Kijang Krista maupun Opel Blazer, Nissan Terano juga dipergunakan untuk mengangkut kayu *illegal* dengan asumsi bahwa tidak mungkin mobil mewah membawa kayu.

Modus terkait dengan komunitas usaha biasanya dilakukan oleh sekelompok komunitas masyarakat yang memiliki jenis usaha yang sama di bidang perkayuan. Agar lebih *survive* baik dalam melindungi diri maupun menghadapi berbagai hambatan yang datang dari pihak aparat maupun dari pihak yang lain yang akan mengganggu kelancaran bisnis, mereka mengorganisir diri dalam satu kelompok usaha. Dengan mengorganisir seperti ini mereka dengan lebih mudah menggerakkan massa dan merasa lebih kuat dalam menghalau menjalani bisnis kayu *illegal*. Ada komunitas penebang, ada juga komunitas pemilik *sawmill* dan sebagainya.

Modus operandi alasan pemanfaatan kayu juga dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk melindungi diri dari hukum yang berlaku. Mereka berdalih bahwa kayu-kayu tersebut hanya untuk keperluan sendiri atau keperluan pembangunan fasilitas pemerintahan seperti sekolah, jembatan, kantor desa dan sebagainya. Namun belakangan alasan ini tidak murni lagi dan dimanfaatkan oleh cukong atau aparat yang mempunyai tujuan komersial dengan memperlak masyarakat lokal.

Proses dan Faktor Penyebab

Regulasi yang berlaku terkait dengan pengelolaan hutan pada kawasan hutan produksi maupun konservasi masih belum melihat masyarakat lokal sebagai bagian dari ekosistem hutan. Berbagai peraturan lebih banyak mengakomodasi kepentingan swasta dan pemerintah. *Euforia* otonomi daerah mendorong pemerintah mengeluarkan ijin-ijin pemanfaatan kayu yang sebenarnya secara ekonomis tidak layak diusahakan, sehingga ada kecenderungan penyalahgunaan ijin tersebut untuk melegalisasi hasil *illegal logging*. Tertutupnya akses masyarakat lokal terhadap hutan juga memicu mereka melakukan aktivitas *illegal logging* agar dapat menikmati hasil hutan. Sistem legal yang berjalan juga sarat dengan biaya ekonomi tinggi sehingga harga kayu yang mengikuti prosedur legal menjadi tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat lokal dan perusahaan sekelas HPH kemudian menjadikan *illegal logging* baik yang dilakukan di kawasan produksi maupun konservasi sebagai salah satu alternatif.

Tingkat sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam yang rendah yang dilihat dari kategori pendapatan dan kemiskinan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan juga basis pekerjaan mendorong mereka melakukan penebangan kayu di kawasan hutan yang relatif terjangkau dari tempat tinggal mereka. Tidak adanya akses terhadap mata pencaharian lain yang lebih menguntungkan daripada menebang kayu juga mendorong masyarakat menebang kayu. Masyarakat merasa tidak terbantu dengan keberadaan hutan produksi yang dikelola oleh HPH maupun kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Pemahaman hutan milik negara dalam benak masyarakat adalah hutan sebagai milik masyarakat, sehingga masyarakat juga mempunyai hak untuk ikut menikmatinya. Apalagi menurut pandangan mereka negara tidak kunjung memberikan dalam bentuk peningkatan tingkat sosial ekonomi mereka bagi masyarakat atas hutan yang dikelolanya. Keuntungan dari hutan masih hanya dinikmati kelompok-kelompok tertentu saja.

Kesenjangan antara *supply* dan *demand* kayu juga berpengaruh terhadap intensitas *illegal logging*. Kesenjangan ini terjadi sebagai akibat konsumsi kayu untuk kebutuhan industri maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan yang cukup tinggi. Kemampuan produksi Kalimantan Selatan pada periode 2001-2004 berkisar 272.259 meter kubik per tahun sampai dengan 719.980,01 meter kubik per tahun.³ Kayu-kayu tersebut berasal dari HPH, HTI dan ijin pemanfaatan kayu lainnya. Sementara itu kapasitas industri kayu terpasang baik legal maupun *illegal* adalah sebesar kurang lebih 4,8 juta meter kubik per

tahun.⁴ Sementara itu estimasi *supply* bahan baku legal dari luar Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tersebut menurut sebuah hasil penelitian 1.850.384,85 meter kubik sampai 2.169.587,77 meter kubik.⁵ Dapat dipastikan bahwa kesenjangan antara *supply* dan *demand* kayu sebesar 1.910.432.99 meter kubik (40%) sampai 2.677.356.15 meter kubik (56%) dipenuhi dari kayu bulat hasil *illegal logging* baik dari dalam maupun luar Provinsi Kalimantan Selatan

Semakin meningkatnya permintaan kayu untuk konsumsi masyarakat lokal juga didorong oleh peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi kayu untuk rumah tinggal yang cukup tinggi. Kurang lebih 89,70%⁷ rumah tangga di Kalimantan Selatan menggunakan kayu sebagai bahan bangunan untuk rumah tinggalnya. Kondisi seperti ini juga berdampak pada semakin tingginya kesenjangan *supply* dan *demand* kayu. Kebutuhan kayu selain dipenuhi dari kayu-kayu dari luar Kalimantan Selatan juga dipenuhi dari kayu hasil *illegal logging*.

Lemahnya penegakan supremasi hukum juga berpengaruh terhadap semakin meningkatnya aktivitas *illegal logging*. Upaya penegakan hukum belum sepenuhnya menyentuh pihak yang terlibat dalam *illegal logging*. Biasanya hanya pelaku di lapangan yang seperti penebang, tukang tarik maupun sopir yang sering tertangkap dan diproses hukum. Sementara itu cukong yang sebenarnya merupakan pemain utama tidak pernah tersentuh hukum. Lemahnya proses penegakan hukum karena aparat penegak hukum sendiri ikut bermain di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya dengan menjadi *backing*, pungutan liar, permintaan uang tebusan untuk pembebasan pelaku yang tertangkap, penerbitan IPK fiktif maupun surat kelengkapan pengangkutan kayu dan sebagainya.

Beberapa kasus *illegal logging* yang memang sudah diproses secara hukum, tetapi sanksi yang dikenakan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan akibat *illegal logging*. Hal itu terjadi baik pada cukong, maupun aparat penegak hukum yang kadang-kadang vonisnya sangat ringan padahal ia adalah pemain lama yang menikmati keuntungan cukup besar. Pihak-pihak yang terlibat masih dapat tersenyum karena sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera.

Upaya penegakan hukum terkesan pandang bulu dan inkonsisten. Pelaku utama (terutama pemodal besar) yang dipandang berjasa kepada salah satu instansi atau oknum tertentu biasanya selalu terhindar dari jeratan hukum. Sementara masyarakat yang sebenarnya bagian kecil dari *mafia illegal logging* menjadi sasaran kesalahan. Perusahaan legal semacam HPH atau IPKH yang berskala besar diindikasikan terlibat dalam kegiatan

illegal logging di kawasan ini juga tidak tersentuh hukum, meskipun bukti yang menguatkan baik dari masyarakat atau dari pihak lain. Penegakan hukum yang pandang bulu ini menimbulkan kecemburuan masyarakat lokal sehingga mereka semakin berani melakukan aktivitas *illegal logging* khususnya di Taman Hutan Raya Sultan Adam.

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian mengenai fenomena *illegal logging* di Taman Hutan Raya Sultan Adam adalah sebagai berikut. *Pertama*, pelaku *illegal logging* terdiri dari aparat pemerintah baik atas nama perorangan ataupun kelembagaan, cukong (pemilik modal) baik yang memiliki ijin legal maupun tidak memiliki ijin dan masyarakat. *Kedua*, dalam menjalankan aksinya para pelaku *illegal logging* menggunakan modus operandi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Modus operandi tersebut antara lain adalah modus operandi legalitas kayu, pengangkutan kayu, komunitas usaha masyarakat dan alasan pemanfaatan kayu. *Ketiga*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal logging* di Taman Hutan Raya Sultan Adam antara lain dapat dijelaskan dengan melihat beberapa aspek antara lain adalah aspek legalitas, aspek kesenjangan *supply* dan *demand*, aspek sosial ekonomi masyarakat dan aspek lemahnya penegakan supremasi hukum.

Beberapa hal dapat disarankan sebagai alternatif solusi fenomena *illegal logging* di Taman Hutan Raya Sultan Adam. *Pertama*, mengubah model pengelolaan sumber daya hutan berbasis negara menjadi berbasis masyarakat. *Kedua*, pengembangan potensi wisata ekologi. *Ketiga*, pengembangan produk serta peningkatan rendemen di industri dengan membentuk divisi pengolahan limbah (*waste center*). *Ketiga*, pelaksanaan program hutan tanaman baik secara benar dengan mempertimbangkan jenis kayu komersial dan jenis kayu untuk konsumsi masyarakat lokal. *Keempat*, mengedepankan pola kemitraan dalam menyelesaikan kasus *illegal logging*. *Kelima*, perlunya perbaikan mental aparat dengan menegakkan perilaku disiplin yang disertai sistem kontrol yang ketat, *punish and reward* tanpa pandang bulu baik kepada masyarakat, cukong (pemilik modal), perusahaan swasta maupun aparat terkait dengan upaya penanganan *illegal logging*.

CATATAN KAKI

¹ Desa definitif adalah desa-desa yang keberadaannya secara formal diakui oleh pemerintah melalui PP Nomor 43/1986, tanggal 18 September 1986. Desa-desa tersebut secara administratif pemerintahan masuk dalam wilayah Kecamatan Aranio.

² SKSHH terbang adalah SKSHH yang diterbitkan untuk melegalisasi kayu-kayu ilegal yang berasal dari kawasan di luar tempat penerbitan SKSHH tersebut. Misalnya SKSHH diterbitkan di Kabupaten A tetapi fisik kayunya berada di luar Kabupaten A.

³ Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2004

⁴ Diolah dari Ekpose Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada Musda ke-6 REI Kalimantan Selatan (18-19 Nopember 2005) dan Ekpose Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penanganan *Illegal logging* dan Peredarannya (2005)

⁵ Analisis Supply Demand Hasil Hutan Kayu Provinsi Kalimantan Selatan, Kerjasama Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Fakultas Kehutanan UNLAM, Banjarbaru (2000)

⁶ Kalimantan Selatan dalam Angka, 2004

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000, *Analisis Supply Demand Hasil Hutan Kayu Provinsi Kalimantan Selatan*, Kerjasama Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Fakultas Kehutanan UNLAM, Banjarbaru.
- Anonim, 2002, *Laporan Penyusunan Rencana Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Catchment Area Riam Kanan*, BPDAS Barito dan Lembaga Penelitian UNLAM, Banjarbaru.
- Anonim, 2002, *Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam Tahun 2002-2006*, BKSDA Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
- Anonim, 2004, *Laporan Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya Sultan Adam*, Kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Fakultas Kehutanan UNLAM, Banjarbaru.
- Anonim, 1989, *Taman Hutan Raya Sultan Adam Kalimantan Selatan*, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
- Arif, Syaiful., 2000, *Menolak Pembangunanisme*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anwar, Wahyudi K., 2002, *Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan, Jalan Berliku yang Tak Juga Berujung*. BP Arupa. Yogyakarta.
- Awang, San Afri., 2003, *Politik Kehutanan Masyarakat*, Kerjasama Center for Critical Social Studies (CCSS) - Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Baiquni, Muhammad., Susilawardani, 2002, *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan, Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*, Transmedia Global Wacana, Yogyakarta.
- Bakhtiar, Irfan., Nugraheni, Sandi A.C. (Penyunting), 2001, *Hutan Jawa Menjemput Ajal Akankah Otonomi Menjadi Solusi ?*, Biro Penerbitan AruPA, Yogyakarta.
- Barda Nawawi, Arief., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- FWI/GFW, 2001, *Keadaan Hutan Indonesia, Forest Watch Indonesia, Bogor Indonesia dan Global Forest Watch*, Washington D.C.
- Garner, BA, 1999, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, Dallas Texas.
- Iskandar, Untung., Nugroho, Agung., 2004, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan Issue dan Agenda Mendesak*, Debut Press, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1992, *Desa dan Perhutanan Sosial*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Nurdjana, Prasetyo, Teguh., Sukardi, (2005), *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwanto, Hari., 2000, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Polda Kalimantan Selatan, 2005, *Upaya Gakkum Illegal logging di Kalimantan Selatan*, Banjarmasin (Presentasi dalam Dialog Interaktif Penertiban Illegal Mining, Illegal logging, dan Illegal Fishing di Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup pada tanggal 6 Desember 2005).
- Purwoko, Herudjati., Dirdjosanjoto (Penyunting), 2004, *Desentralisasi dalam Perspektif Lokal*, Pustaka Percik, Salatiga.
- Rangkuti, Siti Sundari., 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional (Edisi kedua)*, Airlangga University Press.
- Resosudarmo, Ida Ayu Pradnja., Colfer, Carol J. Pierce., 2003, *Ke Mana Harus Melangkah ? Masyarakat, Hutan, Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Salim P., 1987, *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi Keenam, Modern English Press, Jakarta.
- Setiawan, Agus., 2001, *Sistem Kawasan Konservasi di Indonesia Urgensi : Perkembangan, dan Permasalahannya* Makalah Pengantar ke Falsafah Sains (Pps702) Sekolah Pasca Sarjana/S3 Institut Pertanian Bogor.
- Simon, Hasan., 1993, *Hutan Jati dan Kemakmuran Problematika dan Strategi Pemecahannya*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri., Effendi, Sofian., (Editor), 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Sumitro, Achmad., 2000, *Penebangan Liar (Pencurian Kayu) dari Perspektif Rimbawan (Forester) dalam Prosiding Seri Lokakarya II penebangan Kayu Secara Liar (Illegal logging) diselenggarakan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, World Bank dan WWF (Word Wild Life)*.
- Susanto, Hery., 2001, (Editor), *Quo Vadis Penertiban Illegal logging*, Kelompok Studi Lingkungan Hidup Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan, Banjarbaru.
- Syaukani HR, 2004, *Menolak Kembalinya Sentralisasi Memantapkan Otonomi Daerah*, Komunal, Jakarta.
- Wijanto, Djoko., 2004, *Dampak Illegal logging Terhadap Fungsi Sosio-Ekonomi : Kasus*

Hutan Di Pulau Jawa dalam Makalah Pengantar ke Falsafah Sains (Pps702) Sekolah Pasca Sarjana/S3 Institut Pertanian Bogor.

Media Massa:

- Anonim, *Aparat Nikmati Illegal logging*, Banjarmasin Post 17 Nopember 2005
- Anonim, *Bangli Ancam Tahura Sultan Adam*, Banjarmasin Post 24 Juli 2005
- Anonim, *Basit: Terbukti, Tindak Tegas! Dugaan PT Sumpol Timber Melakukan Illegal Logging*, Radar Banjarmasin, 15 September 2004
- Anonim, *Berkas H. Supian ke PN*, Banjarmasin Post, 19 Nopember 2005
- Anonim, *Catatan Akhir Tahun Versi Walhi Kalsel (2 Habis) Illegal logging dan Illegal Mining Dianggap Belum Menyentuh*, Radar Banjarmasin 2 Januari 2006
- Anonim, *Hukum Rimba di Hutan Rimba*, Kompas 18 Juni 2001
- Anonim, *Pencurian Kayu Merugikan Negara Rp 30 Triliun/Tahun, Saat Ini Sudah Menjangkau ke Kawasan Lindung*, Pikiran Rakyat 30 Desember 2005
- Anonim, *Razia Hambat Pengembang Rumah*, Banjarmasin Post, 30 Agustus 2005
- Anonim, *Tahura Kian Parah Tebangan Liar Kian Marak*, Radar Banjarmasin 17 Februari 2004
- Haba, Jhon., *Illegal logging, Penyebab dan Dampaknya*, Kompas 16 September 2003.
- Kartodihardjo, Hariadi., Soedomo, Sudarsono., *"Illegal logging" dalam Tinjauan "Economics of Crime"*, Kompas 5 Maret 2005.
- Suripto, *Memberantas Illegal logging*, Republika, 16 Maret 2005
- Sutarto, Endriartono., *TNI dan Illegal logging*, Warta FKKM Volume 7 Nomor 12 Desember 2004
- Teten Masduki, *Korupsi dan Kelestarian Hutan*, Warta FKKM Volume 7 No. 12, Desember 2004.
- Udiansyah, *Refleksi Kerusakan Demo Illegal logging*, Banjarmasin Post 3 Oktober 2005